

Analisis Wacana Kritis Fairclough terhadap Putusan MK: Kelayakan Capres-Cawapres di Bawah Usia 40

Rosmawati Sianipar¹, Miftahulhairah Anwar²

^{1,2} Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta

e-mail: rozmaruth05@gmail.com

Abstrak

Analisis wacana kritis Fairclough terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kelayakan calon presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun telah mengungkapkan kompleksitas politik, sosial, dan ideologis yang melingkupi keputusan tersebut. Melalui pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini memperlihatkan bagaimana bahasa digunakan untuk mereproduksi kekuasaan, membangun legitimasi, dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keputusan hukum. Analisis juga menyoroti hubungan erat antara kekuasaan politik dan proses peradilan, serta pengaruh konteks sosial-budaya dalam penafsiran terhadap keputusan MK. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa ideologi memainkan peran penting dalam pembentukan keputusan MK, memengaruhi keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum. Implikasi dari keputusan MK juga meluas ke dalam dinamika politik dan sosial, memicu perubahan dalam lanskap politik dan memengaruhi legitimasi lembaga peradilan. Rekomendasi untuk memperhatikan aspek bahasa dalam pembuatan keputusan hukum, melakukan penelitian lebih lanjut dengan perspektif analisis hukum konstitusi dan pendekatan sosiologis, serta memastikan transparansi dan inklusivitas dalam proses pembuatan keputusan hukum, diharapkan dapat memperkuat integritas dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, analisis wacana kritis Fairclough memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas keputusan hukum dalam konteks sosial, politik, dan ideologis, serta memberikan kontribusi yang bermakna dalam memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Keputusan Hukum, Analisis Wacana Kritis, Dampak Sosial*

Abstract

Fairclough's critical discourse analysis of the Constitutional Court's decision regarding the eligibility of presidential and vice-presidential candidates under the age of 40 reveals the political, social, and ideological complexities surrounding the decision. Using a critical discourse analysis approach, this study demonstrates how language is employed to reproduce power, build legitimacy, and influence public perception of legal decisions. The analysis also highlights the close relationship between political power and the judicial process, as well as the influence of socio-cultural context in interpreting the Constitutional Court's decision. Additionally, the findings indicate that ideology plays a significant role in shaping the Court's decisions, affecting justice and equality within the legal system. The implications of the Court's decision extend to political and social dynamics, triggering changes in the political landscape and impacting the legitimacy of judicial institutions. Recommendations to consider language aspects in legal decision-making, conduct further research from a constitutional law analysis perspective and sociological approach, and ensure transparency and inclusivity in the legal decision-making process are expected to strengthen integrity and justice in Indonesia's legal system. Thus, Fairclough's critical discourse analysis provides a deep understanding of the complexities of legal decisions

within social, political, and ideological contexts and offers meaningful contributions to improving the legal system and enhancing the quality of democracy in Indonesia.

Keywords: *Legal Decision, Critical Discourse Analysis, Social Impact*

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berusia di bawah 40 tahun, selama mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat negara, telah memicu debat yang sengit di kalangan masyarakat dan pelaku politik. Pendapat dan komentar bermacam-macam dari berbagai segmen masyarakat, termasuk mahasiswa, ahli hukum, dan aktivis, turut menyertai dinamika diskusi terkait keputusan tersebut. Sebagian menyambut positif, menganggap keputusan MK memberikan peluang lebih luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam arus politik nasional. Sementara itu, di sisi lain, ada yang menentang, khawatir bahwa keputusan ini bisa membuka pintu bagi dominasi politik dinasti serta mengurangi kesempatan bagi kandidat berusia di atas 40 tahun yang memiliki pengalaman lebih matang. Reaksi keras bahkan ditunjukkan dalam aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap putusan tersebut. Dengan demikian, keputusan MK terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan polarisasi pendapat yang memerlukan pendekatan bijak guna menjaga kesatuan dan persatuan nasional, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi pada pemilu serentak 2024. (Subandri, 2024)

Fairclough (2013), adalah seorang pakar dalam bidang analisis wacana, memandang bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat kekuasaan yang digunakan untuk memperkuat ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dengan menerapkan kerangka analisis Fairclough, peneliti dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana teks resmi putusan MK ini merepresentasikan keputusan tersebut, serta bagaimana proses sosial dan politik yang mendasarinya dapat memengaruhi pemahaman dan interpretasi masyarakat.

Menurut Munfarida (2014), dalam konteks konstruksi identitas sosial, relasi sosial, dan sistem pengetahuan dan makna, penelitian ini akan menggali bagaimana keputusan MK tersebut memengaruhi cara masyarakat memandang diri mereka sendiri dan orang lain, serta bagaimana hal ini memengaruhi dinamika hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana keputusan tersebut memengaruhi pemahaman kolektif tentang hukum, keadilan, dan hak asasi manusia, serta bagaimana hal ini memengaruhi cara masyarakat memaknai realitas sosial dan politik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan dalam struktur sosial dan dinamika hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat Indonesia sebagai akibat dari keputusan MK tersebut.

Pendekatan analisis wacana kritis, seperti yang dijabarkan sebelumnya, memungkinkan kita untuk memahami bagaimana keputusan tersebut memengaruhi konstruksi identitas sosial, relasi sosial, dan sistem pengetahuan dan makna dalam masyarakat. Selain itu, analisis wacana kritis juga akan membantu dalam mengidentifikasi ideologi yang melekat dalam diskursus seputar keputusan MK tersebut, serta bagaimana ideologi tersebut mempengaruhi praktik diskursif dan struktur sosial. Dengan demikian, pendekatan ini melengkapi penelitian dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana keputusan MK memengaruhi struktur sosial dan dinamika hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat, serta bagaimana proses tersebut tercermin dalam bahasa dan diskursus yang digunakan.

Melalui analisis wacana kritis ini, kita dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis lapisan-lapisan kekuasaan, ideologi, dan ketidaksetaraan yang tersemat dalam keputusan tersebut, memberikan wawasan yang lebih kaya tentang kompleksitas politik dan sosial yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Dengan memperdalam pemahaman atas dampak keputusan MK dalam struktur sosial dan dinamika masyarakat, tujuan penelitian ini

adalah untuk menganalisis dampak dan implikasi keputusan MK terhadap masyarakat dan sistem politik Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang mendalam terhadap bagaimana keputusan tersebut diungkapkan, dipersepsikan, dan diperdebatkan melalui bahasa. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana keputusan tersebut memengaruhi konstruksi identitas sosial, relasi sosial, dan sistem pengetahuan dan makna dalam masyarakat. Selain itu, analisis wacana kritis juga akan membantu mengidentifikasi ideologi yang melekat dalam diskursus seputar keputusan MK dan bagaimana ideologi tersebut mempengaruhi praktik diskursif dan struktur sosial.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi fokus analisis pada dampak dan implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kelayakan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di bawah usia 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara. Penelitian ini akan terbatas pada analisis wacana kritis Norman Fairclough sebagai pendekatan utama untuk memahami bagaimana keputusan ini tercermin, dipersepsikan, dan diperdebatkan melalui bahasa. Fokus khusus juga akan diberikan pada konstruksi identitas sosial, relasi sosial, dan sistem pengetahuan dan makna dalam masyarakat yang terpengaruh oleh keputusan tersebut. Analisis akan terfokus pada diskursus seputar keputusan MK dan tidak memasukkan aspek teknis hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan ideologi yang mendasari diskursus tersebut serta dampaknya terhadap praktik diskursif dan struktur sosial dalam konteks politik Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam analisis wacana kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kelayakan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di bawah usia 40 tahun yang pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat negara akan mengikuti pendekatan Faircloughian yang terstruktur.

Pendekatan Faircloughian merujuk pada metode analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, seorang ahli linguistik Inggris. Pendekatan ini berfokus pada kajian tentang bagaimana bahasa digunakan untuk mereproduksi dan memperkuat ketidaksetaraan kekuasaan dalam masyarakat. Faircloughian memandang bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang dapat memengaruhi cara kita memahami dunia di sekitar kita.

Dalam analisis wacana kritis versi Faircloughian, teks dianalisis tidak hanya dari segi gramatikal dan makna literalnya, tetapi juga dari perspektif struktur kekuasaan dan ideologi yang tertanam di dalamnya. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana bahasa digunakan untuk menegakkan atau menantang dominasi sosial, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi konstruksi identitas, norma sosial, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat.

Pertama, penelitian akan dimulai dengan pengumpulan data, yaitu putusan resmi MK beserta materi pendukungnya seperti argumen hukum dan konteks sosial-politik yang mendasarinya. Selanjutnya, dilakukan analisis tekstual terhadap teks putusan MK dengan memperhatikan penggunaan bahasa, frasa kunci, dan narasi yang digunakan untuk merumuskan aturan tersebut. Langkah berikutnya adalah analisis prosedural yang memeriksa proses pembentukan keputusan MK, termasuk pertimbangan hukum dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak terlibat. Analisis sosio-kultural akan menyelidiki konteks sosial dan budaya di mana keputusan ini diambil, termasuk hubungan kekuasaan antar kelompok dalam masyarakat serta norma-norma budaya yang memengaruhi pandangan terhadap kepemimpinan politik dan usia. Terakhir, analisis ideologis akan mencoba mengidentifikasi nilai-nilai dan ideologi yang mendasari keputusan tersebut, serta implikasi ideologisnya terhadap tatanan politik dan sosial secara lebih luas. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bahasa

digunakan untuk mereproduksi kekuasaan dan memengaruhi dinamika politik dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MK telah menegaskan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 bahwa keputusan tersebut telah final dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. MK juga menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan/atau wakil presiden yang dialternatifkan bagi calon yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Keputusan ini tentu memicu debat yang sengit di kalangan masyarakat dan pelaku politik, menjadi subjek yang menarik untuk dikaji dalam bidang hukum politik. Namun, debat ini juga memiliki potensi yang menarik untuk dikaji dari perspektif analisis wacana kritis Fairclough.

Analisis wacana kritis Fairclough terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kelayakan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di bawah usia 40 tahun yang pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat negara, dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang konstruksi makna dan implikasi sosial dari keputusan tersebut. Dalam analisis ini, dapat diidentifikasi bagaimana keputusan MK tersebut merekonstruksi makna tentang kelayakan dan kapasitas calon presiden dan wakil presiden, serta bagaimana konstruksi makna tersebut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap partisipasi generasi muda dalam politik. Analisis wacana kritis juga dapat mengungkapkan bagaimana keputusan MK tersebut memengaruhi relasi kekuasaan dan struktur politik di Indonesia, serta bagaimana konstruksi makna tersebut dapat memengaruhi kesetaraan dan keadilan dalam konteks politik dan sosial. Dengan demikian, analisis wacana kritis Fairclough dapat memberikan perspektif yang mendalam dan terperinci tentang bagaimana keputusan MK tersebut memengaruhi dinamika politik dan sosial di Indonesia.

Melalui analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kelayakan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di bawah usia 40 tahun yang pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat negara, beberapa temuan penting dapat diungkap:

A. Reproduksi Kekuasaan melalui Bahasa

Analisis wacana kritis Fairclough menyoroti peran bahasa dalam mereproduksi kekuasaan dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga merupakan instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Dalam putusan MK, penggunaan bahasa yang otoritatif dan legitimasi yang diberikan oleh lembaga resmi seperti MK menjadi kunci dalam menegaskan keabsahan aturan baru yang ditetapkan.

Penggunaan bahasa yang kuat dan terstruktur dalam putusan MK mencerminkan supremasi hukum yang dipegang oleh lembaga tersebut. Frasa-frasa otoritatif, istilah hukum yang khas, dan argumentasi yang disusun dengan cermat menciptakan kesan bahwa keputusan MK adalah hasil dari analisis yang mendalam dan proses yang adil. Dengan demikian, bahasa dalam putusan MK bukan hanya menyampaikan informasi tentang keputusan hukum, tetapi juga menciptakan citra MK sebagai lembaga yang independen dan berwibawa dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Selain itu, bahasa dalam putusan MK juga memainkan peran dalam membangun legitimasi terhadap keputusan tersebut. Ketika lembaga resmi seperti MK menyampaikan keputusan, bahasa yang digunakan memberikan kesan bahwa keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat. Ini menciptakan legitimasi yang kuat di mata masyarakat, bahkan jika tidak semua pihak setuju dengan keputusan tersebut. Dengan demikian, bahasa dalam putusan MK tidak hanya memperkuat struktur kekuasaan yang ada, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat tentang keabsahan dan kekuatan hukum dari keputusan tersebut.

Dengan demikian, analisis wacana kritis Fairclough menyoroti bagaimana bahasa dalam putusan MK digunakan untuk mereproduksi kekuasaan, memperkuat legitimasi

institusi, dan memengaruhi persepsi masyarakat tentang hukum dan keadilan. Pemahaman akan peran bahasa dalam mereproduksi kekuasaan ini penting untuk mengevaluasi integritas institusi peradilan dan memastikan bahwa keputusan hukum diambil secara transparan dan adil.

B. Proses Pembentukan Keputusan yang Terkait dengan Kekuasaan Politik

Fairclough menyoroti proses pembentukan keputusan yang terkait dengan kekuasaan politik dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam proses ini, terungkap bagaimana faktor-faktor politik, termasuk interaksi antar aktor politik dan pengaruh opini publik, dapat memengaruhi keputusan MK. Hal ini menyoroti kompleksitas hubungan antara kekuasaan politik dan proses peradilan.

Dalam pembentukan keputusan MK, interaksi antara hakim-hakim MK dan faktor-faktor politik luar, seperti tekanan dari partai politik atau opini publik, dapat memainkan peran penting. Hakim MK dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai politik yang mereka anut atau oleh kepentingan politik tertentu yang mungkin memengaruhi penafsiran hukum mereka. Selain itu, tekanan dari aktor politik eksternal dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan mengarahkan arah keputusan MK.

Selain interaksi langsung antara aktor politik, opini publik juga dapat memengaruhi pembentukan keputusan MK. Respons masyarakat terhadap kasus-kasus tertentu atau isu-isu yang diputuskan oleh MK dapat mempengaruhi persepsi hakim MK tentang apa yang dianggap sebagai keputusan yang paling sesuai dengan kehendak publik. Dalam beberapa kasus, keputusan MK juga dapat dipengaruhi oleh tekanan politik yang timbul dari reaksi masyarakat terhadap kasus tersebut.

Dengan demikian, proses pembentukan keputusan MK tidak terlepas dari dinamika kekuasaan politik yang ada dalam masyarakat. Analisis wacana kritis Fairclough menyoroti bahwa keputusan MK tidak selalu murni berdasarkan pertimbangan hukum semata, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada dalam masyarakat. Pemahaman akan faktor-faktor politik yang memengaruhi pembentukan keputusan MK penting untuk mengevaluasi independensi dan integritas lembaga peradilan serta memastikan bahwa keputusan hukum diambil secara adil dan berdasarkan hukum.

C. Pengaruh Konteks Sosial-Budaya terhadap Penafsiran

Pengaruh yang dimiliki konteks sosial-budaya dalam proses penafsiran terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi sorotan. Konteks sosial, yang mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan masyarakat tentang berbagai isu, dapat berperan penting dalam membentuk pemahaman terhadap keputusan hukum.

Pertama, norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi penafsiran terhadap keputusan MK. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, seperti pandangan tentang usia, kepemimpinan, dan partisipasi politik, dapat membentuk sudut pandang yang beragam terhadap keputusan tersebut. Misalnya, dalam konteks keputusan terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden, norma sosial tentang pengalaman dan kematangan dalam kepemimpinan dapat memengaruhi bagaimana masyarakat menilai keputusan MK.

Kedua, faktor budaya juga memainkan peran penting dalam penafsiran terhadap keputusan MK. Aspek budaya, seperti tradisi politik lokal, identitas etnis atau agama, dan struktur sosial masyarakat, dapat memengaruhi persepsi terhadap keputusan hukum. Misalnya, dalam masyarakat yang memiliki budaya politik yang kuat, keputusan MK dapat dilihat sebagai bagian dari tradisi politik yang sudah ada sebelumnya, sementara dalam masyarakat yang lebih heterogen, keputusan tersebut mungkin menjadi subjek perdebatan yang lebih intens.

Dengan demikian, analisis wacana kritis Fairclough menyoroti bahwa konteks sosial-budaya dapat membentuk penafsiran terhadap keputusan MK. Pemahaman akan pengaruh konteks ini penting dalam mengevaluasi resepsi masyarakat terhadap keputusan hukum dan dalam merumuskan strategi komunikasi yang efektif untuk menjelaskan atau mempertahankan keputusan tersebut. Selain itu, pemahaman akan

konteks sosial-budaya juga penting dalam memastikan bahwa keputusan MK dapat diterima secara luas dalam masyarakat.

D. Ideologi dalam Pengambilan Keputusan

Hal lain yang disorot adalah peran ideologi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Temuan menunjukkan bahwa ideologi tertentu dapat membentuk dasar argumen dalam putusan MK, mengindikasikan bahwa keputusan hukum tidak selalu netral secara ideologis, tetapi sering kali terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianut oleh pengambil keputusan.

Dalam konteks pengambilan keputusan MK, ideologi dapat tercermin dalam pemahaman tentang konstitusi, hukum, dan konsep-konsep politik lainnya. Misalnya, pandangan tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, atau peran negara dalam masyarakat dapat memengaruhi bagaimana hakim MK menafsirkan undang-undang dan memutuskan kasus-kasus yang diajukan ke hadapannya. Selain itu, keputusan MK juga dapat dipengaruhi oleh ideologi politik yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu di dalam lembaga tersebut.

Selain ideologi yang dimiliki oleh individu atau kelompok di dalam MK, ideologi juga dapat tercermin dalam tekanan politik dari luar. Partai politik, kelompok kepentingan, atau opini publik yang menganut ideologi tertentu dapat memengaruhi pembentukan opini hakim MK atau memengaruhi proses pengambilan keputusan secara keseluruhan. Dengan demikian, keputusan MK dapat tercermin dari pertarungan ideologi yang ada dalam masyarakat atau di antara aktor politik yang berpengaruh.

Analisis wacana kritis Fairclough menyoroti bahwa pemahaman akan peran ideologi dalam pengambilan keputusan penting untuk mengevaluasi integritas dan konsistensi keputusan hukum. Hal ini juga penting untuk memahami bagaimana ideologi dapat memengaruhi keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum. Dengan demikian, pemahaman akan ideologi dalam konteks pengambilan keputusan MK dapat membantu dalam menilai akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan serta memastikan bahwa keputusan hukum diambil dengan mempertimbangkan kepentingan yang adil dan berkeadilan.

E. Implikasi dalam Dinamika Politik dan Sosial

Analisis wacana kritis Fairclough memberikan wawasan tentang implikasi dalam dinamika politik dan sosial yang terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Temuan dari analisis tersebut mengungkap bagaimana keputusan MK tidak hanya memiliki dampak hukum, tetapi juga membawa implikasi yang signifikan dalam arena politik dan sosial.

Dalam konteks politik, keputusan MK dapat memicu perubahan dalam lanskap politik, terutama dalam konteks pemilihan umum dan persaingan politik. Keputusan MK yang kontroversial atau yang memiliki implikasi politik yang besar dapat memicu reaksi dari partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat mengubah dinamika persaingan politik dan strategi politik yang diadopsi oleh aktor politik dalam menjelang pemilihan umum atau dalam merespons keputusan MK.

Selain itu, keputusan MK juga dapat memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika sosial masyarakat. Kontroversi yang muncul dari keputusan MK dapat memperdalam perpecahan dalam masyarakat, memicu protes, demonstrasi, atau ketegangan sosial. Selain itu, keputusan MK yang dianggap kontroversial atau tidak adil oleh sebagian masyarakat dapat menggerakkan gerakan sosial atau advokasi untuk perubahan hukum atau kebijakan yang lebih luas.

Implikasi dalam dinamika politik dan sosial dari keputusan MK juga dapat mempengaruhi legitimasi lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Keputusan MK yang dianggap tidak netral atau terpengaruh oleh kekuatan politik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan independensi lembaga peradilan, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial secara keseluruhan.

Dengan demikian, analisis wacana kritis Fairclough memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi luas dari keputusan MK dalam dinamika politik dan sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek politik dan sosial dalam mengevaluasi dampak keputusan hukum dalam masyarakat.

F. Rekomendasi

Berdasarkan analisis wacana kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa rekomendasi dan implikasi lanjutan dapat dipertimbangkan. Pertama, pentingnya pemantauan kritis terhadap penggunaan bahasa dalam teks keputusan hukum untuk memastikan bahwa bahasa yang digunakan tidak hanya menguatkan kekuasaan yang ada, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokratis dan keadilan. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembuatan keputusan hukum, termasuk MK, memperhatikan secara khusus aspek bahasa dalam proses pembuatan keputusan mereka.

Kedua, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak sosial dan politik dari keputusan-keputusan hukum seperti yang dianalisis dalam konteks penelitian ini. Analisis lebih lanjut dapat membantu dalam mengidentifikasi implikasi yang lebih rinci terhadap masyarakat dan sistem politik, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang dinamika politik dan sosial yang terjadi.

Selanjutnya, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah yang transparan dan inklusif dalam proses pembuatan keputusan hukum yang sensitif secara politik. Ini termasuk memperhatikan pandangan beragam dari berbagai pihak, termasuk ahli hukum, aktivis, dan masyarakat sipil.

Adopsi pendekatan analisis wacana kritis seperti yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi alat yang berguna dalam pemantauan dan evaluasi keputusan-keputusan hukum di masa depan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat terus memperkuat integritas dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Terakhir, selain pendekatan analisis wacana kritis yang telah dijelaskan dalam tulisan ini, ada banyak perspektif dan pendekatan lain yang dapat memberikan wawasan yang berharga terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dampaknya dalam masyarakat. Salah satunya adalah pendekatan analisis hukum konstitusi, yang akan mengeksplorasi aspek-aspek konstitusional dari keputusan MK, termasuk konsistensi dengan prinsip-prinsip konstitusi, kepatuhan terhadap hukum, dan implikasi terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Pendekatan sosiologis juga akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dampak sosial dari keputusan MK. Melalui analisis sosiologis, kita dapat memeriksa bagaimana keputusan ini mempengaruhi dinamika sosial, struktur kekuasaan, dan ketimpangan dalam masyarakat. Hal ini akan membuka ruang untuk mengeksplorasi aspek-aspek seperti perubahan sosial, pertentangan sosial, dan reaksi kolektif terhadap keputusan hukum yang kontroversial.

Dengan memperhatikan rekomendasi ini, diharapkan bahwa hasil analisis wacana kritis terhadap putusan MK ini tidak hanya memberikan wawasan yang lebih dalam tentang keputusan hukum itu sendiri, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

SIMPULAN

Analisis wacana kritis Fairclough terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kelayakan calon presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun mengungkapkan kompleksitas politik, sosial, dan ideologis yang melingkupi keputusan tersebut. Analisis tersebut menyoroti peran bahasa dalam mereproduksi kekuasaan, membangun legitimasi, dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keputusan hukum. Selain itu, analisis juga menunjukkan hubungan erat antara kekuasaan politik dan proses peradilan, serta pengaruh konteks sosial-budaya dalam penafsiran terhadap keputusan MK.

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa ideologi memainkan peran penting dalam pembentukan keputusan MK, memengaruhi keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum. Implikasi dari keputusan MK juga meluas ke dalam dinamika politik dan sosial, memicu perubahan dalam lanskap politik dan memengaruhi legitimasi lembaga peradilan. Rekomendasi untuk memperhatikan aspek bahasa dalam pembuatan keputusan hukum, melakukan penelitian lebih lanjut dengan perspektif analisis hukum konstitusi dan pendekatan sosiologis, serta memastikan transparansi dan inklusivitas dalam proses pembuatan keputusan hukum diharapkan dapat memperkuat integritas dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, analisis wacana kritis Fairclough memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas keputusan hukum dalam konteks sosial, politik, dan ideologis, serta memberikan kontribusi yang bermakna dalam memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjayani, D, & Hudiyo, Y (2023). Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough “Kuda–Kuda Prabowo Hadapi Anies Di Pilpres 2024.” Dalam Rubrik Politik Koran Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial ..., bajangjournal.com, <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/5937>
- Dijk, TA Van (2011). Discourse, knowledge, power and politics. Critical discourse studies in context and cognition, torrossa.com, <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5001398&publisher=FZ4850#page=36>
- Ellyawati, HC (2016). Analisis wacana kritis teks berita kasus terbongkarnya perlakuan istimewa terhadap terpidana suap Arthalyta Suryani pada media online. Jurnal The Messenger, journals.usm.ac.id, <http://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/267>
- Fairclough, N (2013). Language and power., taylorfrancis.com, <https://doi.org/10.4324/9781315838250>
- Fowler, R (2013). Language in the News: Discourse and Ideology in the Press., taylorfrancis.com, <https://doi.org/10.4324/9781315002057>
- Gaskin, R (2020). Language and world: A defence of linguistic idealism., taylorfrancis.com, <<https://doi.org/10.4324/9781003023630>>
- Haryatmoko, J (2010). Dominasi penuh muslihat: akar kekerasan dan diskriminasi., books.google.com, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dkcCR9vOfEoC&oi=fnd&pg=PR10&q=dominasi+penuh+mushlihat+akar+kekerasan+dan+diskriminasi&ots=YymukwLHiG&sig=VjX55co9xcB5DD4Wd9IZPe8yfCQ>
- Munfarida, E (2014). Analisis wacana kritis dalam perspektif Norman Fairclough. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, ejournal.uinsaizu.ac.id, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/komunika/article/view/746>
- Subandri, R (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, journal.stekom.ac.id, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1512>